

BAB VI

KESIMPULAN PENGARUH ASPEK KEPRANATAAN TERHADAP BENTUK PERMUKIMAN

6.1 Kesimpulan

Hasil bentuk fisik bangunan, zonasi fungsi, pola perkembangan massa bangunan adalah hasil dari proses penataan secara formal dan informal. Beberapa peraturan formal yang dapat dikaji dari Peraturan Daerah No.3 Tahun 2018 Tentang RTRW Kabupaten Samosir 2018-2038, Peraturan Daerah No.21 Tahun 2006 Tentang Penataan Kawasan Perdesaan dan RTBL Kawasan Tomok-Tuktuk Siadong (KSPN Danau Toba) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017. Selain itu, ada juga beberapa penataan informal seperti kesepakatan masyarakat setempat untuk tidak saling mengganggu, tetapi mempersilahkan siapapun untuk membangun bangunan dengan bentuk dan fungsi apapun selama tidak saling mengganggu.

Bentuk fisik arsitektur pada segment penelitian di Lingkungan 3 Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir adalah produk dari perubahan aturan penataan secara formal dan informal. Beberapa contoh yang dapat kami lihat adalah dari aspek ketinggian bangunan, zonasi, bentuk bangunan (ornamen & atap), GSB, KDB, KLB. Selama proses perubahan, pengetatan dan pengawasan peraturan berjalan, semua aspek ini juga berubah, seperti yang sudah di jabarkan pada bab v.

Perubahan peraturan dan penataan akan bermanfaat untuk kedepannya karena peraturan muncul dengan pemikiran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuat keadilan, dan menjaga masyarakat. Kepranataan dalam pembangunan juga memiliki tujuan yang sama. Pranata pembangunan seperti Peraturan Daerah dibuat untuk menjaga dan menjadi sebuah panduan ataupun pengawasan pembangunan. Seperti yang sudah di bahas pada Sub bab 2.2.2 mengenai konsep aspek pendukung non fisik seperti ekonomi kreatif dan juga UMKM. Pembebasan fungsi (tentu saja dengan persyaratan yang sudah memenuhi standar pembuatan izin dari Dinas Pendapatan) mendukung munculnya UMKM dan ekonomi kreatif yang menggerakkan ekonomi daerah.

Pengaruh aspek kepranataan secara formal dan informal dapat dilihat memiliki kaitan yang kuat terhadap bentuk permukiman. Aspek kepranataan juga menjadi sebuah pendukung bagi aspek pertumbuhan ekonomi perdesaan dan juga pariwisata dikarenakan hukum yang muncul memiliki wawasan yang mengarah terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh yang jelas, sebuah kawasan pariwisata hadir dan berjalan dengan adanya sebuah keunikan lokal. Keunikan lokal bisa berupa kerajinan, destinasi wisata alam, wisata arsitektur bangunan dan banyak hal lain. Sebagai kawasan yang dirancang khusus untuk pariwisata, seiring dengan waktu, peraturan berubah mengenai bentuk bangunan dan mendorong pembangunan untuk memperlihatkan arsitektur khas Batak Toba. Kekhasan seperti ini adalah dorongan untuk membuat sebuah bentuk fisik arsitektur yang memperlihatkan kawasan tersebut. Ornamen dan atap khas Batak Toba bisa menjadi sebuah keunggulan bagi pariwisata karena sering kali sebuah tempat di ingat dengan bentuk yang unik atau tradisi yang unik.

Selain bentuk fisik arsitektur bangunan, keunggulan pembebasan zonasi fungsi juga membuat sebuah perancangan kawasan yang terpadu dan saling mendukung. Fungsi yang beredar dan tersebar mempermudah pada wisatawan untuk menjalankan harinya pada saat berkunjung.

6.2 Saran

Proses penataan formal dan informal sudah sangat lengkap dan jelas. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Vettyria BR. Ginting (Sekretariat Kantor Kelurahan), peraturan yang sudah tertulis sudah jelas. Akan tetapi, proses pengawasan dan pengetatan yang masih kurang. Hal ini menyebabkan beberapa bangunan yang masih melanggar peraturan dan juga perizinan.

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (pengorganisasian)
3. Penyusunan staf (Departemenisasi)
4. *Actuating* (penggerakan)
5. *Controlling* (pengawasan)

Sebagai saran, yang sangat penting adalah proses nomor 4 dan 5, penggerakan dan pengawasan. Pergerakan dan pengawasan sangat penting karena peraturan atau penataan yang sudah jelas dan bermanfaat bagi masyarakat banyak tidak akan berguna jika poin nomor 4 dan 5 tidak berjalan dengan baik.

Selain pengawasan, hal lain yang mungkin dapat menjadi saran adalah untuk membuat terlebih dahulu sebuah peraturan formal pada daerah atau kawasan yang belum ada pembangunan. Dapat dilihat dari permukiman lingkungan 3 Kelurahan Tuktuk Siadong bahwa hasil dari proses peraturan formal yang muncul sesudah adanya bangunan pada kawasan membuat sebuah arsitektur permukiman yang bervariasi. Jarak bangunan dari jalan raya berbeda karena GSB berubah, beberapa bangunan memiliki bentuk yang mencerminkan arsitektur Batak Toba tetapi banyak juga yang sangat sederhana.

